

**DESENTRALISASI, PARTISIPASI POLITIK,
KARAKTERISTIK DAERAH DAN KASUS KORUPSI: STUDI
KASUS 35 KAB/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH**



**HALAMAN JUDUL
SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
Pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh:

**UMAYYA HANIF BERLIAN
NIM. 12020115140114**

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

2019

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Umayya Hanif Berlian
Nomor Induk Mahasiswa : 12020115140114
Fakultas/Departemen : Ekonomi dan Bisnis/ Ilmu Ekonomi dan Studi
Pembangunan
Judul Skripsi : **DESENTRALISASI, PARTISIPASI POLITIK,
KARAKTERISTIK DAERAH DAN KASUS
KORUPSI: STUDI KASUS 35 KAB/KOTA DI
PROVINSI JAWA TENGAH.**
Dosen Pembimbing : Akhmad Syakir Kurnia, S.E., M.Si., Ph.D.

Semarang, 12 Juni 2019

Dosen Pembimbing,

(Akhmad Syakir Kurnia, S.E., M.Si., Ph.D)

NIP. 197306101998021001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Umayya Hanif Berlian

Nomor Induk Mahasiswa : 12020115140114

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ Ilmu Ekonomi dan Studi
Pembangunan

Judul Skripsi : **DESENTRALISASI, PARTISIPASI POLITIK,
KARAKTERISTIK DAERAH DAN KASUS
KORUPSI: STUDI KASUS 35 KAB/KOTA DI
PROVINSI JAWA TENGAH.**

Dosen Pembimbing : Akhmad Syakir Kurnia, S.E., M.Si., Ph.D.

Telah dinyatakan lulus pada tanggal 23 Juli 2019

Tim penguji

1. Akhmad Syakir Kurnia, S.E., M.Si., Ph.D. (.....)
2. Dr. Agr Deden Dinar Iskandar, S.E., MA. (.....)
3. Evi Yulia Purwanti, S.E., M.Si. (.....)

Mengetahui,
Pembantu Dekan I

(Anis Chariri, S.E., M.Com., Ph.D., Akt.)

NIP. 19670809 199203 1001

PERNYATAAN ORISINILITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Umayya Hanif Berlian, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **“Desentralisasi, Partisipasi Politik, Karakteristik Daerah dan Kasus Korupsi: Studi Kasus 35 Kab/kota di Provinsi Jawa Tengah”** adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Semarang, 28 Juli 2019

Yang membuat pernyataan,

(Umayya Hanif Berlian)

NIM: 12020115140114

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah SABAR dan SHALAT sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar”

(QS. Al Baqarah: 153)

*Skripsi ini saya persembahkan untuk,
Ibu dan Bapak saya.*

ABSTRAK

Adanya desentralisasi sangat diharapkan mampu memperbaiki masalah-masalah yang ada di pusat seperti kurang efektifnya layanan kepada masyarakat dikarenakan pusat tidak mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat sehingga sering terjadi ketidakcocokan atau *in-line*. Selain itu, dengan adanya desentralisasi diharapkan mampu mengatasi masalah di pusat seperti halnya korupsi. Namun, kenyataannya dengan adanya desentralisasi justru memberi peluang pada pemerintah daerah untuk melakukan korupsi. Korupsi pada sistem desentralisasi dapat melalui jalur birokrasi, karena birokrasi pemerintah merupakan penyedia utama fasilitas barang publik dan berbagai peraturan - peraturan yang berlaku di suatu daerah.

Pada penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh dari tingkat kemandirian daerah, tingkat partisipasi masyarakat, Sumber Daya Alam, pendidikan, PDRB dan dana perimbangan terhadap korupsi. Kemudian secara teknis, penelitian ini mengandung tahapan pemeriksaan yang disesuaikan dengan rumusan dan tujuan penelitian, yaitu: pemeriksaan pengaruh dari tingkat kemandirian, tingkat partisipasi politik, Sumber Daya Alam, pendidikan, PDRB, dan dana perimbangan terhadap korupsi. Penelitian ini dilakukan melalui model regresi logit yang mencakup 35 Kab/kota di Provinsi Jawa Tengah dalam periode tahun 2013-2017.

Hasil dari penelitian ini adalah dari 6 variabel yang peneliti gunakan, ternyata hanya ada satu variabel yang berpengaruh signifikan terhadap probabilitas terjadinya korupsi di Jawa Tengah pada tahun 2013-2017.

Kata kunci: Desentralisasi, pendidikan, partisipasi politik, SDA, dan korupsi.

ABSTRACT

The existence of decentralization is expected to be able to improve the problems that exist in the center such as the lack of effective service to the community because the center does not know what is needed by the community so that there is often incompatibility or in-line. In addition, the existence of decentralization is expected to be able to overcome problems at the center as well as corruption. However, the fact that decentralization has actually provided a gap for local governments to commit corruption. Corruption in a decentralized system can be through the bureaucracy, because the government bureaucracy is the main provider of public goods facilities and various regulations that apply in an area.

In this study aims to see how the influence of the level of regional independence, the level of community participation, Natural Resources, education, GRDP and fiscal balance funds against corruption. Then technically, this research contains stage of examination that are adjusted to the formulation and objectives of the study, namely: examination of the level of independence, level of politic participation, Natural Resources, education, GRDP, and fiscal balance funds against corruption. This research was conducted through a logistic regression model that included 35 districts / cities in Central Java during 2013-2017.

The results of this study are that of the 6 variabels that the researchers used, there was only one variabel that had a significant effect on the probability of corruption in Central Java in 2013-2017.

Keywords: Decentralization, education, political participation, natural resources, and corruption.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulisan skripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi dan melengkapi salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi oleh setiap mahasiswa Departemen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro sebagai syarat dalam menyelesaikan pendidikan sarjana (S1). Judul skripsi yang telah disusun ini adalah **“Desentralisasi, Partisipasi Politik, Karakteristik Daerah dan Kasus Korupsi: Studi Kasus 35 Kab/kota di Provinsi Jawa Tengah.”**

Penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih memiliki banyak kekurangan, akan tetapi dalam pelaksanaannya, banyak pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing, serta memberikan dorongan moral dan materil dalam penulisan skripsi ini kepada:

1. Mama dan papa, selaku orangtua penulis yang selalu mendoakan dan memberikan semangat serta dukungan kepada penulis dalam segala hal, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Akhmad Syakir Kurnia, S.E., M.Si., Ph.D. selaku dosen pembimbing dan Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, motivasi, saran serta dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
4. Achma Hendra Setiawan S.E., M.Si. selaku dosen wali atas dukungan dan bimbingan yang diberikan.
5. Segenap dosen dan staf pengajar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, khususnya dosen Ilmu Ekonomi dan Studi

Pembangunan yang telah banyak memberikan ilmu dan pengalaman yang bermanfaat kepada penulis selama menempun studi.

6. Saudari penulis, Shafira dan saudara penulis, Muzaki yang sangat penulis sayangi.
7. Sahabat semasa SMA yang penulis sayangi, Begal Banyumanik, yang selalu menemani, membantu, mendoakan, memotivasi, serta bersama-sama melewati baik suka maupun duka serta canda dan tawa selama masa SMA hingga saat ini.
8. Sahabat semasa perkuliahan yang penulis sayangi, The A Team, yang selalu menemani, membantu, mendoakan, memotivasi, serta bersama-sama melewati baik suka maupun duka serta canda dan tawa selama masa perkuliahan sehingga membuat masa perkuliahan lebih berkesan.
9. Teman-teman penulis yang menjadi bagian dari IESP UNDIP'15, yang telah mendoakan, menyemangati, dan menguatkan penulis sehingga dapat melewati masa perkuliahan dengan kegembiraan.
10. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih belum sempurna. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik serta saran untuk melengkapi skripsi ini agar lebih baik sehingga dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Semarang 28 Juli, 2019

Penulis

Umayya Hanif Berlian

(12020115140114)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINILITAS	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	19
1.3 Tujuan Penelitian	20
1.4 Kegunaan Penelitian	21
1.5 Sistematika Penulisan.....	21
BAB II TELAAH PUSTAKA.....	23
2.1 <i>Literature Review</i>	23
2.2 Landasan Teori	37
2.2.1 Desentralisasi Fiskal.....	37
2.2.2 Korupsi.....	44
2.2.3 Teori Keagenan (Agency Theory).....	56
2.2.4 Akuntabilitas	61
2.2.5 Barang Publik.....	63
2.3 Kerangka Pemikiran dan Model Teoritis	71
2.3.1 Pengaruh Variabel Tingkat Kemandirian Daerah Terhadap Korupsi	73
2.3.2 Pengaruh Variabel Tingkat Partisipasi Politik Terhadap Korupsi	74

2.3.3 Pengaruh Variabel Pendidikan Terhadap Korupsi	76
2.3.4 Pengaruh Variabel PDRB Terhadap Korupsi	76
2.3.5 Pengaruh Variabel Sumber Daya Alam Terhadap Korupsi	77
2.3.6 Pengaruh Variabel Dana Perimbangan Terhadap Korupsi	78
2.4 Perumusan Hipotesis	80
BAB III METODE PENELITIAN	82
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	82
3.1.1 Tindak Pidana Korupsi (TPK).....	82
3.1.2 Tingkat Kemandirian Daerah	83
3.1.3 Sumber Daya Alam (SDA)	84
3.1.4 Pendidikan.....	84
3.1.5 Partisipasi Politik.....	85
3.1.6 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	86
3.1.7 Dana Perimbangan.....	87
3.2 Jenis dan Sumber Data	87
3.3 Populasi Penelitian.....	88
3.4 Metode Pengumpulan Data	90
3.5 Metode Penelitian	90
3.5.1 Model Empiris Logit	90
3.5.2 Menilai Model Fit.....	93
BAB IV PEMBAHASAN.....	98
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	98
4.1.1 Korupsi.....	98
4.1.2 Desentralisasi	101
4.1.3 Pendidikan.....	107
4.1.4 Sumber Daya Alam	112
4.1.5 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	114
4.1.6 Partisipasi Politik.....	116
4.1.7 Dana Perimbangan.....	120
4.2 Analisis Data.....	121
4.2.1 Statistik Deskriptif.....	121
4.2.2 Analisis Regresi.....	125

4.2.3 Interpretasi Hasil	132
BAB V PENUTUP	140
5.1 Kesimpulan.....	140
5.2 Keterbatasan	142
5.3 Saran.....	142
DAFTAR PUSTAKA	143
LAMPIRAN 147	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Indeks Persepsi Korupsi Pada Negara Asean–5	4
Tabel 1.2 Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Profesi atau Jabatan di Indonesia Tahun 2013-2017.....	5
Tabel 1.3 TPK di Provinsi Jawa Tengah dalam periode tahun 2013-2017.....	6
Tabel 1.4 Tingkat Kemandirian Daerah di Provinsi Jawa Tengah Per Kab/kota Dalam Periode Tahun 2013-2017.....	9
Tabel 1.5 Tingkat Kehadiran Masyarakat Pada Pemilihan umum Gubernur di Provinsi Jawa Tengah Pada Tahun 2013-2018	11
Tabel 1.6 IPM Dimensi Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah Dalam Periode Tahun 2013-2017.....	15
Tabel 1.7 PDRB per Kapita Atas Harga Konstan Tahun 2010 di Provinsi Jawa Tengah Dalam Periode Tahun 2013-2017.	17
Tabel 2.1 Rangkuman Penelitian Terdahulu	28
Tabel 3.1 Jenis dan Sumber Data	88
Tabel 3.2 Daftar Daerah Yang Menjadi Populasi.....	89
Tabel 4.1 Tingkat Kemandirian Daerah di Provinsi Jawa Tengah Per Kab/kota Dalam Periode Tahun 2013-2017.....	105
Tabel 4.2 IPM di Provinsi Jawa Tengah Dalam Periode Tahun 2013-2017.....	111
Tabel 4.3 PDRB Per Kapita Atas Harga Konstan 2010 di Provinsi Jawa Tengah Dalam Periode Tahun 2013-2017.....	115
Tabel 4.4 Tingkat Kehadiran Masyarakat Dalam Pemilihan umum Gubernur di Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2013-2018	119
Tabel 4.5 Statistik Deskriptif.....	122
Tabel 4.6 Uji Hosmer dan Lemeshow’s <i>Goodness of Fit</i>	125
Tabel 4.7 Hasil Regresi Melakukan Tindak Pidana Korupsi	126

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 <i>Fraud Triangle</i>	56
Gambar 2.2 Korupsi Dalam <i>Principal Model Klien (Client)</i>	58
Gambar 2.3 Rente Ekonomi Dari Dana Perimbangan	67
Gambar 2.4 Permintaan Barang Publik.....	69
Gambar 2.5 Permintaan Barang Privat	71
Gambar 2.6 Kerangka Pemikiran	80
Gambar 4.1 Indeks Persepsi Korupsi Pada Negara Asean-5.....	99
Gambar 4.2 TPK Berdasarkan Profesi/jabatan.....	100
Gambar 4.3 TPK di Provinsi Jawa Tengah	101
Gambar 4.4 Bagan Desentralisasi Tanggung Jawab Dari Pemerintah Pusat	103
Gambar 4.5 PAD Kota Semarang dan Kota Tegal	106
Gambar 4.6 IPM di Indonesia Pada Tahun 2013-2017.....	107
Gambar 4.7 Belanja Pemerintah Pusat Berdasarkan Fungsi Pada Tahun 2013-2017	108
Gambar 4.8 Anggaran Pendidikan Melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa	109

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A : Tabulasi Data	147
Lampiran B : Opini Kriteria LKPD Jawa Tengah menurut 35 Kab/kota	159
Lampiran C : Hasil Regresi Logit.....	159
Lampiran D : Hasil Uji H-L	160
Lampiran D : Hasil Statistik Deskriptif	161

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desentralisasi adalah suatu proses penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang terpilih atau kepada daerah otonom. Dengan diberlakukannya penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam penyediaan barang publik kepada masyarakat menurut Oates (2005) serta dengan adanya desentralisasi dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pemerintahan, Seabright (dalam Oates, 2005). Desentralisasi sering diartikan sebagai suatu proses pengembangan kekuatan untuk pemerintah regional dan daerah dengan menggeser struktur akuntabilitas dari pusat ke tingkat subnasional (Tiebout, 1956). Oates mengusulkan teorema yang dikenal dengan teorema desentralisasi, ia mengatakan bahwa akan lebih efisien bagi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan barang publik, karena pemerintah daerah lebih mengetahui apa yang lebih dibutuhkan masyarakat dan apabila bersifat sentralisasi akan seragam untuk semua daerah sehingga kurang efektif dalam penyediaan barang publik karena kebutuhan setiap daerah tidaklah sama (Oates, 2006). Selain Oates, salah satu teori yang mendukung desentralisasi dikemukakan oleh Tiebout (1956) yang dikenal dengan "*The Tiebout Model*" ia menekankan bahwa masyarakat akan memilih daerahnya sendiri sesuai dengan preferensinya berdasarkan pelayanan publik dari pemerintah daerahnya dengan pajak yang dibayar oleh masyarakat. Dengan begitu, sangat

diharapkan dengan adanya desentralisasi dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam penyediaan barang publik dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

Seiring dengan berjalannya waktu, banyak para ahli yang meneliti lebih lanjut mengenai desentralisasi seperti Prud'homme (1995) dan Tanzi (1996), mereka berpendapat bahwa terdapat banyak ketidaksempurnaan dalam penyediaan layanan daerah yang dapat mencegah terwujudnya manfaat dari desentralisasi, terutama pada negara berkembang. Prud'homme (1995) dan Tanzi (1996) mengatakan bahwa masalah dalam birokrat di daerah mungkin kurang dilatih maka tidak efisien dalam menyampaikan barang dan jasa kepada masyarakat dan mereka juga telah menyatakan bahwa korupsi mungkin dapat tumbuh lebih besar pada tingkat daerah, mungkin karena keintiman dan frekuensi interaksi yang lebih besar antara individu dan pejabat swasta di tingkat yang lebih terdesentralisasi. Sehingga, dalam kasus ini Prud'homme (1995) dan Tanzi (1996) melihat bahwa desentralisasi kurang tepat apabila diimplementasikan pada negara berkembang. Hal itu dapat disebabkan karena pada negara berkembang memiliki institusi, informasi, dan kapasitas yang lemah (Lecuna, 2012).

Pada negara berkembang khususnya negara Indonesia, dimana Indonesia sudah menjalankan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sejak tahun 2000 yang ditandai dengan dikeluarkannya UU No. 22 tahun 1999 yang kemudian diperbarui menjadi UU No. 32 tahun 2004, dan kemudian mengalami pembaruan kembali menjadi UU No. 23 tahun 2014. Diharapkan pemerintah daerah mampu menyediakan barang publik secara efektif dan efisien. Namun sejalan dengan Prud'homme (1995) dan Tanzi (1996) dimana desentralisasi tidak sesuai apabila

diimplementasikan di negara berkembang, sistem desentralisasi di Indonesia tidak berjalan dengan sebagaimana yang diharapkan. Di Indonesia, gagalnya sistem desentralisasi dapat ditandai dengan semakin meningkatnya korupsi pada tingkat daerah yang dikarenakan lemahnya akuntabilitas maupun *checks and balances*. Faktanya banyak pejabat yang cenderung menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang untuk kepentingan diri sendiri maupun kalangan kelompok tertentu yang dapat disebut dengan korupsi. Menurut *Transparency International* (TI), yang disebut dengan korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus atau politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Setiap akhir tahun, *Transparency International* (TI) mengeluarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yaitu peringkat negara yang menunjukkan seberapa besar terjadinya korupsi di sektor publik. Skor yang diberikan memiliki rentang 0-100 atau sangat korup hingga sangat bersih dari praktek korupsi. Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara terkorup seperti yang diperlihatkan dari hasil survei yang dilakukan TI dari tahun 2013 hingga tahun 2017. Dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini, dimana Indonesia pada ASEAN-5 merupakan negara yang paling korup pada tahun 2013 dengan skor 32 dan menduduki peringkat ke-114 dari 180 negara di dunia. Indonesia memiliki skor IPK yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun, khususnya dari tahun 2013 hingga tahun 2017, namun pada tahun 2016-2017 mengalami stagnan pada skor 37.

Tabel 1.1 Indeks Persepsi Korupsi Pada Negara Asean-5

Negara	2013	2014	2015	2016	2017
Singapura	86	84	85	84	84
Malaysia	50	52	50	49	47
Thailand	35	38	38	35	37
Filipina	36	38	35	35	34
Indonesia	32	34	36	37	37

Sumber : Transparency International (TI) 2013-2017, diolah

Setelah berjalannya sistem desentralisasi di Indonesia pada tahun 2000, korupsi sepertinya berjalan dari pusat menuju daerah. Banyak pejabat negara maupun pejabat daerah yang terseret kasus korupsi, hal ini tentu dapat terjadi karena lemahnya akuntabilitas dan *checks and balances*. Korupsi pada sistem desentralisasi dapat melalui jalur birokrasi, karena birokrasi pemerintah merupakan penyedia utama fasilitas barang publik dan berbagai peraturan yang berlaku di suatu daerah, dengan begitu masalah korupsi pada sistem desentralisasi sangat berkaitan erat dengan *rent-seeker* atau yang sering disebut dengan pemburu rente. Menurut Tullock (1967) perburuan rente terjadi ketika seorang pengusaha atau perusahaan mengambil manfaat atau nilai yang tidak dikompensasikan dari yang lain dengan melakukan manipulasi terhadap lingkungan usaha atau bisnis. Manipulasi terhadap lingkungan usaha tersebut juga terjadi karena perebutan monopoli atas aturan main ataupun regulasi. Karena itu, pelaku usaha yang melakukan lobi untuk mempengaruhi aturan lebih memihak kepada dirinya dengan pengorbanan pihak lainnya disebut dengan pemburu rente atau *rent-seekers*. Sehingga dengan begitu para kapitalis yang berusaha mendekati birokrasi dengan tujuan mendapatkan keuntungan bisnis bisa disebut pula sebagai pemburu rente (*rent-seeker*). Pemburu rente mencari dan berusaha mendapatkan rente dengan berbagai cara, di antaranya

menawarkan perlindungan, menyerahkan sumber daya yang dimiliki, atau memberikan wewenang tertentu yang diatur dan di bawah kekuasaannya. Penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dari para pejabat negara ini lah yang merupakan nafas dari aktivitas perburuan rente.

Korupsi di Indonesia memang bukan lagi hal baru, dapat kita lihat pada tabel 1.2 dibawah ini dimana kasus korupsi dengan urutan paling banyak dilakukan oleh anggota DPR/DPRD kemudian Bupati/ Wali Kota dan Wakil dan pada urutan terakhir adalah Gubernur. Sehingga pada kasus desentralisasi yang melibatkan kepala daerah seperti halnya Bupati atau Wali Kota, terlihat bahwa kasus korupsi yang dilakukan oleh bupati atau Wali Kota lebih banyak dari pada gubernur.

Tabel 1.2 Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Profesi atau Jabatan di Indonesia Tahun 2013-2017.

Profesi / Jabatan	2013	2014	2015	2016	2017	Jumlah
Anggota DPR/ DPRD	8	9	19	23	20	79
Gubernur	2	3	3	1	1	10
Wali Kota/ Bupati dan Wakil	3	12	4	9	13	32

Sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2013-2017, diolah

Pada tabel 1.3 dibawah merupakan data tindak pidana korupsi (TPK) di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2013 hingga tahun 2017, khususnya pada tindak pidana korupsi yang dilakukan pada level pemerintahan daerah, yaitu yang dilakukan oleh Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota dan Wakil), DPRD, Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 35 Kab/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 1.3 TPK di Provinsi Jawa Tengah dalam periode tahun 2013-2017.

Tahun	Jumlah TPK
2013	4
2014	2
2015	1
2016	3
2017	5
Total	15

Sumber : KPK 2013-2017, diolah

Pada tabel 1.3 diatas, dapat dilihat Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Jawa Tengah dari tahun ke tahun mengalami naik turun atau berfluktuasi. Tindak Pidana Korupsi (TPK) diatas merupakan korupsi yang di lakukan oleh Bupati/Wali Kota dan Wakil, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 35 Kab/kota di Provinsi Jawa Tengah. Dari jumlah TPK diatas dapat kita lihat TPK paling banyak terjadi pada tahun 2017 sebanyak 5 kasus korupsi dan pada paling rendah pada tahun 2015 TPK sebanyak 1 kasus.

Sejalan dengan studi yang dilaukan oleh Prud'homme (1995) dan Tanzi (1996), dimana dengan adanya desentralisasi dapat meningkatkan korupsi pada negara berkembang dan studi dari Shleifer & Vishny (1993), menyatakan dengan adanya desentralisasi dapat meningkatkan korupsi pada tingkat daerah. Di Indonesia nampaknya dengan adanya sistem desentralisasi yang diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam penyediaan barang publik dan mampu mengatasi masalah korupsi pada pemerintah pusat sepertinya tidak berjalan dengan sebagaimana yang diharapkan, karena dengan adanya desentralisasi hanya menggeser korupsi dari pusat ke daerah. Hal tersebut dapat dikarenakan masih lemahnya akuntabilitas dan *checks and balances* pada pemerintahan di Indonesia.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Ades & Di tella (1999) menyatakan bahwa Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki oleh suatu daerah ternyata pada kenyataannya dapat meningkatkan tingkat tindak pidana korupsi pada daerah tersebut. Dalam teori dan penelitian terdahulu, telah menjelaskan beberapa faktor yang diduga dapat menyebabkan maraknya korupsi pada level pemerintah daerah karena adanya sistem desentralisasi seperti, kurangnya akuntabilitas pada pemerintahan, kurangnya partisipasi masyarakat dalam ikut mengawasi jalannya pemerintahan di daerah, adanya Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah pada masing-masing daerah dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian, pendidikan yang seharusnya dapat menurunkan tindak pidana korupsi namun pada kenyataannya pendidikan yang semakin tinggi justru semakin meningkatkan tindak pidana korupsi.

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Pengertian ini sesuai dengan UU No. 23 tahun 2014. Dengan adanya desentralisasi maka muncul otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga pemerintah daerah diberikan kebebasan untuk mengatur kebutuhan daerahnya sendiri serta dengan melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal pemerintahan daerah memiliki wewenang untuk menggali pendapatan dan mengelola keuangan daerahnya baik pada sisi pendapatan asli daerah maupun belanja daerah. Desentralisasi dapat diproksi menggunakan tingkat kemandirian

daerah atau dengan melihat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi dengan belanja daerah. Apabila nilai PAD per belanja daerah tinggi maka dapat dikatakan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya sudah cukup baik, karena pemerintah dapat memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah dan mungkin dalam menjalankan pemerintahannya sudah menggunakan sistem *checks and balances* dan akuntabilitas yang efektif, karena dengan adanya sistem *checks and balances* yang efektif dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan di antara eksekutif dan legislatif menurut Persson, Roland & Tabellini (1997) dan dengan semakin baik pengelolaan keuangan suatu daerah dapat dikatakan bahwa daerah tersebut semakin mandiri karena tidak bergantung kepada pemerintah pusat. Pada tabel 1.4 merupakan nilai tingkat kemandirian daerah di Provinsi Jawa Tengah dalam periode tahun 2013-2017.

Dapat dilihat pada tabel 1.4 nilai tingkat kemandirian daerah paling tinggi pada tahun 2013 adalah Kota Semarang dengan nilai sebesar 0,374, pada tahun 2014 masih dipegang oleh Kota Semarang dengan nilai 0,357, dan untuk tahun 2015 dan 2016 hingga tahun 2017 juga masih dipegang oleh Kota Semarang. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Semarang pada tahun 2013-2017 merupakan daerah yang paling mandiri di Provinsi Jawa Tengah, serta Kota Semarang dapat mengelola keuangan dengan baik sehingga tidak bergantung pada pemerintah pusat.

Tabel 1.4 Tingkat Kemandirian Daerah di Provinsi Jawa Tengah Per Kabupaten/kota Dalam Periode Tahun 2013-2017.

(Dalam Satuan Rasio)

Kab/kota	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Kab. Cilacap	0,144	0,179	0,170	0,105	0,123
Kab. Banyumas	0,153	0,200	0,199	0,187	0,200
Kab. Purbalingga	0,109	0,159	0,166	0,109	0,120
Kab. Banjarnegara	0,084	0,120	0,112	0,109	0,137
Kab. Kebumen	0,084	0,086	0,120	0,083	0,210
Kab. Purworejo	0,106	0,138	0,131	0,130	0,132
Kab. Wonosobo	0,110	0,135	0,089	0,091	0,133
Kab. Magelang	0,137	0,101	0,150	0,139	0,165
Kab. Boyolali	0,113	0,141	0,106	0,141	0,178
Kab. Klaten	0,072	0,054	0,092	0,098	0,150
Kab. Sukoharjo	0,150	0,173	0,192	0,193	0,246
Kab. Wonogiri	0,077	0,081	0,085	0,145	0,144
Kab. Sragen	0,104	0,148	0,132	0,404	0,184
Kab. Grobogan	0,095	0,143	0,156	0,143	0,121
Kab. Blora	0,072	0,103	0,101	0,093	0,141
Kab. Rembang	0,119	0,130	0,165	0,135	0,174
Kab. Pati	0,120	0,150	0,145	0,124	0,163
Kab. Kudus	0,125	0,114	0,152	0,150	0,148
Kab. Jepara	0,099	0,154	0,253	0,268	0,158
Kab. Demak	0,103	0,141	0,142	0,139	0,186
Kab. Semarang	0,162	0,165	0,167	0,138	0,164
Kab. Temanggung	0,102	0,137	0,142	0,153	0,056
Kab. Kendal	0,104	0,096	0,107	0,120	0,139
Kab. Batang	0,173	0,142	0,131	0,134	0,141
Kab. Pekalongan	0,117	0,183	0,157	0,198	0,150
Kab. Pemasang	0,092	0,134	0,118	0,127	0,186
Kab. Tegal	0,102	0,148	0,157	0,130	0,153
Kab. Brebes	0,081	0,136	0,126	0,115	0,190
Kota Magelang	0,170	0,242	0,253	0,252	0,262
Kota Surakarta	0,073	0,227	0,243	0,253	0,298
Kota Salatiga	0,200	0,258	0,247	0,221	0,260
Kota Semarang	0,374	0,375	0,385	0,294	0,332
Kota Pekalongan	0,172	0,196	0,192	0,205	0,211
Kota Tegal	0,262	0,309	0,284	0,267	0,302

Sumber : Data Sekunder 2013-2017, diolah

Keikutsertaan masyarakat yang sering disebut dengan partisipasi masyarakat diharapkan dapat membantu menurunkan tindak pidana korupsi. Peran serta masyarakat tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan hak dan tanggungjawab masyarakat dalam penyelenggaraan negara yang bersih dari tindak pidana korupsi. Partisipasi politik merupakan sikap masyarakat dalam menentukan pilihan dan arah menuju perubahan yang lebih baik kedepannya. Salah satu indikator keberhasilan dan kualitas pelaksanaan penyelenggaraan pemilu yang demokratis adalah partisipasi masyarakat dalam mengikuti tahapan-tahapan pemilu. Sehingga, peran serta masyarakat juga sangat penting dalam usaha untuk menurunkan tindak pidana korupsi. Sejalan dengan teori Klitgaard (1988), ia mengatakan bahwa akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dapat mengurangi korupsi. Akuntabilitas menurut Klitgaard (1988) adalah dimana para pejabat tidak menyalahgunakan kekuasaan mereka, sehingga para pejabat dalam pengertian umum bertanggungjawab kepada warga negara, sehingga sistem akuntabilitas yang baik menjadi sangat penting atau dapat disebut dengan kunci berjalannya sistem desentralisasi yang dapat memberikan manfaat bagi pemerintah dan masyarakat serta pemerintahan yang bersih dari korupsi. Klitgaard (1998) berpendapat bahwa strategi antikorupsi juga harus diarahkan pada penguatan peran masyarakat dalam mengawasi pemerintah serta penguatan akuntabilitas publik. Pada level daerah, partisipasi politik dapat dilihat dengan menggunakan keikutsertaan masyarakat dalam Pemilihan umum Gubernur (pilgub) di Provinsi Jawa Tengah. Jika dilihat Pada tabel 1.5 dibawah ini merupakan data partisipasi politik di Provinsi Jawa Tengah dalam periode tahun 2013-2018.

Tabel 1.5 Tingkat Kehadiran Masyarakat Pada Pemilihan umum Gubernur di Provinsi Jawa Tengah Pada Tahun 2013-2018

(dalam satuan persen)

Kab/kota	Tingkat Kehadiran Masyarakat
Kab. Cilacap	53,04
Kab. Banyumas	59,43
Kab. Purbalingga	58,87
Kab. Banjarnegara	56,37
Kab. Kebumen	57,39
Kab. Purworejo	58,65
Kab. Wonosobo	62,14
Kab. Magelang	71,31
Kab. Boyolali	61,38
Kab. Klaten	57,56
Kab. Sukoharjo	61,52
Kab. Wonogiri	56,50
Kab. Karanganyar	61,64
Kab. Sragen	52,11
Kab. Grobogan	45,78
Kab. Blora	55,88
Kab. Rembang	51,52
Kab. Pati	44,52
Kab. Kudus	79,26
Kab. Jepara	44,85
Kab. Demak	44,92
Kab. Semarang	61,57
Kab. Temanggung	82,89
Kab. Kendal	56,75
Kab. Batang	54,47
Kab. Pekalongan	46,94
Kab. Pemalang	46,76
Kab. Tegal	48,49
Kab. Brebes	44,59
Kota Magelang	66,70
Kota Surakarta	64,47
Kota Salatiga	68,68
Kota Semarang	61,45
Kota Pekalongan	47,45
Kota Tegal	54,25

Sumber: KPU Jawa Tengah, 2013-2017

Pada tabel 1.5 dapat dilihat jika tingkat kehadiran masyarakat pada Pemilihan umum Gubernur di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013-2018 memiliki rata-rata sebesar 55,73 %, sehingga apabila dilihat dengan menggunakan rata-rata tersebut, maka terdapat 13 Kab/kota dari 35 Kab/kota yang masih dibawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah, dengan tingkat kehadiran terendah yaitu pada daerah Kab. Pati sebesar 44,52% dan disusul oleh kab. Brebes dengan tingkat kehadiran 44,59%. Kemudian untuk daerah yang berada diatas rata-rata sebanyak 22 Kab/kota dari 35 Kab/kota, dengan tingkat kehadiran tertinggi yaitu pada daerah Kab. Temanggung sebesar 82,89%, kemudian Kab. Kudus dengan tingkat kehadiran sebesar 79,26%.

Menurut penelitian Ades & Di Tella (1999), menjelaskan bahwa Sumber Daya Alam yang dimiliki suatu daerah dapat meningkatkan tingkat tindak pidana korupsi di daerah tersebut. Kemudian dalam pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab dengan titik berat ekonomi daerah dibebankan pada daerah Kab/kota, maka diperlukan sumber-sumber pendapatan atau penerimaan daerah yang dapat diandalkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah. Pajak Daerah berdasarkan UU No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Salah satu pajak daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah Kab/kota adalah Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C atau yang sudah berganti nama menjadi Pajak Mineral Bukan

Logam dan Batuan, yaitu pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C yang bersumber dari alam. Sumber Daya Alam pada setiap daerah merupakan anugrah dari Tuhan yang seharusnya dapat kita rawat, jaga, dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sehingga pada kasus ini, sumber daya alam yang diharapkan mampu menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penerimaan pajak daerah bukan lagi merupakan sebuah anugrah namun menjadi malapetaka pada daerah tersebut karena dapat meningkatkan tingkat korupsi. Dapat dilihat penerimaan Pajak Galian Golongan C disetiap daerah mengalami naik turun setiap tahunnya, pada daerah Kab. Purbalingga dan Kab. Purworejo mengalami fluktuasi yang cukup signifikan dan jika dilihat pada data tersebut kegiatan galian golongan C banyak terjadi pada daerah kabupaten dan pada daerah kota, hanya Kota Semarang saja yang terdapat kegiatan galian golongan C. Data realisasi penerimaan Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C di Provinsi Jawa Tengah dalam periode tahun 2013-2017 dapat dilihat pada lampiran A.

Pada kasus pendidikan, menurut teori Mauro (1995) ia mengatakan bahwa semakin tinggi pendidikan suatu negara maka tingkat korupsinya harusnya menjadi rendah. Hal tersebut dikarenakan ketika pendidikan yang tinggi dapat meningkatkan sikap kritis dari masyarakat terhadap perilaku menyimpang aparatur pemerintah, sehingga dengan semakin tinggi pendidikan dapat menurunkan tingkat tindak pidana korupsi. Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lecuna (2012) ia menjelaskan bahwa semakin tinggi pendidikan justru meningkatkan tindak pidana korupsi. Pada zaman sekarang ini, fenomena degradasi moral semakin banyak terjadi, khususnya di Indonesia. Kasus-kasus amoral pada saat ini

melibatkan banyak orang terdidik, seperti halnya pada kasus korupsi dan kolusi. Pada dasarnya pendidikan dapat di proksi menggunakan banyak indikator, salah satunya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat atau penduduk). Di Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). Dapat kita lihat pada tabel 1.6 merupakan Indeks Pembangunan Manusia IPM khusus dimensi pendidikan di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2013-2017.

Dengan melihat tabel 1.6 data menunjukkan bahwa pada 35 Kab/kota di Provinsi Jawa Tengah nilai IPM khususnya pada dimensi pendidikan yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya dari tahun 2013-2017, hal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah selalu mengalami perbaikan, dengan kata lain pendidikan masyarakatnya semakin baik atau meningkat.

Tabel 1.6 IPM Dimensi Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah Dalam Periode Tahun 2013-2017.

Kab/kota	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Kab. Cilacap	11.98	12.27	12.28	12.20	12.30
Kab. Banyumas	12.11	12.56	12.57	12.58	12.63
Kab. Purbalingga	11.10	11.51	11.78	11.93	11.94
Kab. Banjarnegara	10.53	10.70	11.39	11.40	11.41
Kab. Kebumen	11.83	12.07	12.49	12.61	12.90
Kab. Purworejo	12.83	13.03	13.04	13.05	12.47
Kab. Wonosobo	11.03	11.34	11.43	11.67	11.68
Kab. Magelang	11.76	12.00	12.14	12.15	12.47
Kab. Boyolali	11.33	11.65	12.13	12.14	12.15
Kab. Klaten	12.27	12.74	12.84	12.85	12.97
Kab. Sukoharjo	12.66	12.96	13.42	13.79	13.80
Kab. Wonogiri	11.77	11.94	12.42	12.43	12.44
Kab. Sragen	11.92	12.19	12.21	12.30	12.64
Kab. Grobogan	11.92	12.19	12.21	12.30	12.64
Kab. Blora	11.53	11.75	11.91	11.92	12.13
Kab. Rembang	11.24	11.46	12.02	12.03	12.04
Kab. Pati	10.93	11.24	11.79	11.92	12.29
Kab. Kudus	12.34	12.58	13.14	13.19	13.20
Kab. Jepara	12.06	12.25	12.27	12.28	12.70
Kab. Demak	11.62	11.84	12.43	12.44	12.54
Kab. Semarang	12.55	12.81	12.82	12.83	12.84
Kab. Temanggung	11.39	11.69	11.89	12.06	12.07
Kab. Kendal	11.60	11.83	12.41	12.68	12.69
Kab. Batang	10.45	10.65	11.09	11.51	11.87
Kab. Pekalongan	11.55	11.93	12.00	12.15	12.16
Kab. Pemalang	11.05	11.26	11.86	11.87	11.88
Kab. Tegal	11.63	11.99	12.00	12.01	12.06
Kab. Brebes	10.75	11.03	11.34	11.37	11.69
Kota Magelang	12.65	12.98	13.10	13.55	13.79
Kota Surakarta	13.64	13.92	14.14	14.50	14.51
Kota Salatiga	14.61	14.95	14.97	14.98	14.99
Kota Semarang	13.66	13.97	14.33	14.70	15.20
Kota Pekalongan	11.56	11.93	12.59	12.77	12.78
Kota Tegal	11.61	11.96	12.46	12.88	12.89

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013-2017

Saat ini Indonesia terus menerus mengalami masalah pertumbuhan ekonomi dan tingkat korupsi yang terus meningkat. Hampir setiap hari kita melihat dan mendengar kasus korupsi yang melibatkan para politisi dan pejabat negara. Seperti yang kita ketahui, korupsi dapat berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, pandangan umum menyatakan bahwa korupsi dapat mendistorsi alokasi sumberdaya yang efisien dalam perekonomian. Menurut Lambsdorff (2007) ia mengatakan bahwa korupsi adalah sifat buruk yang menyebabkan rendahnya pertumbuhan ekonomi dan Treisman (2000), ia mengatakan bahwa korupsi akan menurun ketika suatu daerah sudah mulai maju. Sehingga dengan melihat teori dan penelitian tersebut, dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan antara korupsi dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat melalui Produk Domestik Bruto (PDB) atau yang sering disebut dengan *Gross Domestic Product* (GDP). PDB dapat diartikan dimana jumlah produksi baik barang atau jasa yang telah dihasilkan oleh unit produksi di suatu daerah pada saat tertentu. Dalam penelitian ini, karena menggunakan level daerah Kab/kota maka untuk memproksi PDB adalah PDRB. Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB adalah jumlah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari semua kegiatan perekonomian diseluruh wilayah dalam periode tahun tertentu yang pada umumnya dalam waktu satu tahun. Dalam penelitian ini PDRB yang digunakan adalah PDRB perkapita atas harga konstan tahun 2010. PDRB perkapita atas harga konstan dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk pada suatu daerah. Pada tabel 1.7 merupakan PDRB per kapita atas harga konstan 2010 di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2013-2017.

Tabel 1.7 PDRB per Kapita Atas Harga Konstan Tahun 2010 di Provinsi Jawa Tengah Dalam Periode Tahun 2013-2017.

(Dalam Satuan Ribu Rupiah)

Kab/kota	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Kab. Cilacap	45.814	46.990	49.624	51.978	51.605
Kab. Banyumas	17.310	18.118	19.050	20.023	21.170
Kab. Purbalingga	14.444	14.985	15.645	16.316	16.984
Kab. Banjarnegara	12.374	12.938	13.634	14.232	14.931
Kab. Kebumen	12.181	12.839	13.634	14.232	14.886
Kab. Purworejo	13.992	14.566	15.291	16.022	16.800
Kab. Wonosobo	13.432	14.003	14.585	15.261	16.488
Kab. Boyolali	16.877	17.902	18.855	19.861	20.715
Kab. Klaten	17.617	18.565	19.568	20.390	21.347
Kab. Wonogiri	16.239	17.031	17.889	18.767	19.680
Kab. Karanganyar	22.920	23.882	24.861	25.959	27.152
Kab. Sragen	21.315	23.035	24.335	15.132	33.819
Kab. Grobogan	10.832	11.209	11.812	12.275	12.904
Kab. Blora	13.807	14.413	15.118	18.599	19.611
Kab. Rembang	15.995	16.671	17.524	18.295	19.277
Kab. Pati	18.333	19.064	20.091	21.066	22.084
Kab. Kudus	75.212	76.237	78.227	79.277	80.623
Kab. Jepara	13.548	13.986	14.483	14.989	15.534
Kab. Demak	12.334	12.725	13.340	13.872	14.498
Kab. Semarang	29.451	27.240	28.743	29.859	31.085
Kab. Temanggung	15.438	16.061	16.746	17.423	18.079
Kab. Kendal	23.418	24.764	26.279	27.516	28.825
Kab. Batang	15.456	16.196	16.591	17.263	18.024
Kab. Pekalongan	13.976	14.558	15.143	15.814	16.534
Kab. Pemasang	10.294	10.823	11.388	11.963	12.573
Kab. Tegal	12.756	13.350	14.036	14.820	15.572
Kab. Brebes	13.494	14.139	14.916	15.609	16.398
Kota Magelang	29.665	41.449	43.441	45.567	47.782
Kota Surakarta	50.514	52.903	55.549	58.339	61.156
Kota Salatiga	39.134	40.719	42.212	43.793	45.462
Kota Semarang	61.691	65.058	64.141	66.790	69.410
Kota Pekalongan	18.758	19.596	20.388	21.279	22.216
Kota Tegal	32.969	34.662	36.380	38.188	40.128

Sumber: BPS 2013-2017, diolah

Pada tabel 1.7 dapat dilihat tahun dari tahun 2013 hingga 2017 Kab. Kudus merupakan daerah yang memiliki nilai PDRB per kapita yang paling tinggi kemudian Kota Semarang pada urutan kedua. Maka dapat dikatakan bahwa masyarakat Kab.Kudus merupakan daerah yang masyarakatnya paling sejahtera dibandingkan Kab/kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah.

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2005, dana perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan tersebut bertujuan untuk mendukung pendanaan program otonomi. Kemudian permasalahan dana perimbangan yang menjadi sumber penerimaan potensial bagi daerah berhubungan erat dengan pembagian urusan pemerintahan pusat dan daerah karena dananya bersumber dari APBN. Menurut teori Arrow (dalam Elahi, 2017), Samuelson (1954) dan Musgrave (dalam Oates, 2005), menjelaskan bahwa adanya dana perimbangan dapat menimbulkan peluang untuk rente ekonomi, namun adanya rente ekonomi tersebut terjadi apabila *checks and balances* dan akuntabilitas yang lemah. Di Indonesia, desentralisasi fiskal yang dapat ditandai dengan transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang disebut dengan dana perimbangan ini sering dijadikan sebagai rente ekonomi yang dapat disebut juga dengan tindak pidana korupsi. Dalam penelitian ini dana perimbangan yang digunakan adalah total transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah (DBH, DAU, DAK). Jika kita lihat terdapat perbedaan dana perimbangan yang diterima

oleh setiap daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memberikan dana perimbangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerahnya. Dana perimbangan yang diterima oleh 35 Kab/kota di Provinsi Jawa Tengah dalam periode tahun 2013-2017 dapat dilihat pada laman lampiran A.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan adanya desentralisasi di Indonesia memberikan wewenang bagi daerah untuk mengelola keuangan daerahnya sendiri, selain itu dapat mengeksploitasi kekayaan yang dimiliki oleh daerah masing-masing, termasuk sumber daya alam yang ada di daerah. Namun, nampaknya dengan adanya kewenangan yang begitu besar bagi pemerintah daerah ternyata memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk melakukan korupsi. Sehingga untuk menangkal peluang tersebut menurut Klitgaard (1988) perlu meningkatkan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dan menurut Persson, Torsten & Tabellini (1997) perlu meningkatkan *checks and balances* antara legislatif dan eksekutif.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya, terdapat beberapa hal yang mendasari penelitian pengaruh desentralisasi yang tidak diimbangi dengan akuntabilitas dan *checks and balances* yang baik terhadap korupsi di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan hal tersebut diatas, masalah penelitian dalam studi ini diformulasikan sebagai berikut ini:

1. Bagaimana pengaruh tingkat kemandirian daerah terhadap korupsi di Provinsi Jawa Tengah dalam periode tahun 2013-2017?

2. Bagaimana pengaruh tingkat partisipasi politik terhadap korupsi di Provinsi Jawa Tengah dalam periode tahun 2013-2017?
3. Bagaimana pengaruh Sumber Daya Alam terhadap korupsi di Provinsi Jawa Tengah dalam periode tahun 2013-2017?
4. Bagaimana pengaruh pendidikan terhadap korupsi di Provinsi Jawa Tengah dalam periode tahun 2013-2017?
5. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap korupsi di Provinsi Jawa Tengah dalam periode tahun 2013-2017?
6. Bagaimana pengaruh dana perimbangan terhadap korupsi di Provinsi Jawa Tengah dalam periode 2013-2017?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh tingkat kemandirian daerah terhadap korupsi Provinsi Jawa Tengah dalam periode tahun 2013-2017.
2. Menganalisis pengaruh tingkat partisipasi politik terhadap korupsi Provinsi Jawa Tengah dalam periode tahun 2013-2017.
3. Menganalisis pengaruh Sumber Daya Alam terhadap korupsi Provinsi Jawa Tengah dalam periode tahun 2013-2017.
4. Menganalisis pengaruh pendidikan terhadap korupsi Provinsi Jawa Tengah dalam periode tahun 2013-2017.
5. Menganalisis pengaruh PDRB terhadap korupsi Provinsi Jawa Tengah dalam periode tahun 2013-2017.
6. Menganalisis pengaruh dana perimbangan terhadap korupsi di Provinsi Jawa Tengah dalam periode 2013-2017.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan atau manfaat sebagai berikut:

1. Menambah wawasan dan pengetahuan khususnya bagi peneliti tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tindak pidana korupsi di Jawa Tengah.
2. Dapat menjadi sumber referensi bagi kegiatan penelitian bagi akademisi berikutnya yang mengangkat tema tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tindak pidana korupsi.
3. Dapat memberikan bukti empiris tentang pengaruh faktor tentang sumber daya alam, IPM, desentralisasi, pendidikan, tingkat partisipasi masyarakat, dan dana perimbangan terhadap tindak pidana korupsi.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

BAB I berisi tentang latar belakang masalah yang mendasari terjadinya tindak pidana korupsi di level pemerintah daerah, kemudian memaparkan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

BAB II membahas tentang telaah pustaka yang berisi tentang landasan teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana korupsi baik internasional maupun nasional dan kerangka pemikiran dari penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

BAB III menjelaskan metode penelitian meliputi definisi operasional, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang mendukung.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB IV memaparkan hasil dan analisis yang terdiri dari deskripsi objek penelitian. Selain itu terdapat analisis data dan pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana korupsi.

BAB V : PENUTUP

BAB V memuat penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran-saran bagi pihak yang terkait dengan masalah penelitian.